



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Menteri Agama RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 18 Maret 2024
Waktu	: 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023; 3. Isu-Isu Aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 42 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI, 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin, 3. Menteri Agama RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi para Wakil Ketua Hj. Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua H. Abdul Wachid. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI membahas “**Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2023 dan Isu-isu Aktual**”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran Kementerian Agama RI Tahun 2023 sebesar Rp72.781.930.993.510,- (*tujuh puluh dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sepuluh rupiah*) atau 97,95% dari pagu anggaran sebesar Rp74.304.800.033.000,- (*tujuh puluh empat triliun tiga ratus empat miliar delapan ratus juta tiga puluh tiga ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Pagu	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	31.386.746.381.000	30.978.638.629.455	98,70
2	Inspektorat Jenderal	168.453.626.000	168.004.422.339	99,73
3	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	2.213.275.466.000	2.005.103.817.342	90,59
4	Ditjen Pendidikan Islam	36.442.328.999.000	35.609.621.170.597	97,71
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	785.853.484.000	763.108.458.203	97,11
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	313.991.672.000	297.906.625.293	94,88
7	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	194.101.459.000	193.587.810.055	99,74
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.372.756.235.000	1.352.913.679.254	98,55
10	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	630.434.054.000	626.118.996.972	99,32
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	340.608.411.000	336.563.109.068	98,81
Jumlah		74.304.800.033.000	72.781.930.993.510	97,95

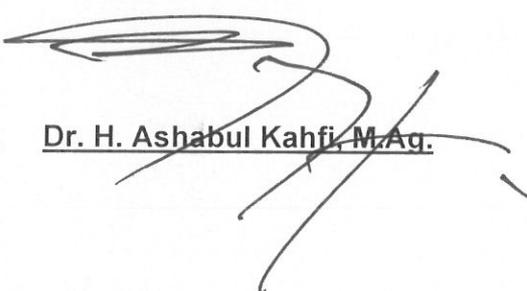
2. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai stakeholders tentang rencana kebijakan Layanan Keagamaan Inklusif di KUA.

- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka maraknya umrah backpacker yang bertujuan memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jemaah umrah.
- c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, di antaranya permasalahan mengenai penyaluran PIP dan KIP.
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk rekonsiliasi data kependidikan EMIS dan Dapodik dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan keagamaan.
- e. Melakukan penataan kembali terhadap PPPK di wilayah Kementerian Agama RI dengan mempertimbangkan asal domisili pegawai.
- f. Memperbaiki kualitas pelayanan dan pelaksanaan berbagai kegiatan di lingkungan Kementerian Agama RI.
- g. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan sertifikasi halal dan melakukan evaluasi atas prosedur yang diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.02 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**


Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.